

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Latah Anggaran Rehab Bangunan

## Dari Rumah Dinas Gubernur hingga Lurah

**JAKARTA** - Masalah pembengkakan alokasi anggaran rumah dinas gubernur belum usai. Kini muncul lagi usul alokasi anggaran pembangunan kantor lurah di lima kota administratif. Alasannya, seluruh bangunan rumah dinas lurah sudah berusia di atas 20 tahun.

"Ada yang sudah lebih dari 20 tahun bangunan kantor kelurahan yang belum direhab. Dan kondisinya sangat mengganggu layanan pegawai," ujar Wali Kota Jakarta Selatan Marullah, Senin (7/10/2019).

Berdasarkan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020, anggaran perencanaan dan rehab rumah dinas itu tersebar di pos anggaran pemerintah kota. Berdasar hitungan yang tertera pada Senin (7/10/2019), total anggaran rumah dinas seluruh kantor lurah di DKI mencapai Rp 15,2 miliar.

Marullah menambahkan, pihaknya hanya menyodorkan bangunan yang perlu di rehab adalah bangunan tua. Namun, bagi bangunan yang masih baru meski kondisinya sudah kusam, tidak menjadi prioritas untuk diusulkan rehab. "Hanya bangunan yang tua saja diusulkan untuk direhab tahun depan," tutur dia ■

Apalagi, sambung dia, sejumlah bangunan yang ditemui di wilayah Jakarta Selatan sudah rapuh dan goyang. Termasuk ada juga halaman kelurahan yang sempit, sehingga mengganggu proses pelayanan yang diberikan petugas ke masyarakat. "Tahun depan itu, kelurahan harus memiliki lahan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), sekarang ini halamannya butuh rehab," jelas Marullah.

Meski begitu, kata dia, setiap tahun ada kantor kelurahan yang dibangun. Karena, banyak sekali bangunan yang sudah berdiri sejak 1980-an, tapi belum ada rehab. Namun, dia mengakui, untuk prio-

ritas pembangunan yang sudah dilakukan pemantauan langsung.

Hal senada diungkapkan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi. Menurut dia, perencanaan rehab kantor kelurahan itu baru sebatas usulan saja di KUA PPAS 2020. Sehingga, menurut dia, usulan itu bisa disetujui atau tidak. "Kan baru usulan, kita tidak tahu apakah akan disetujui atau tidak," kata dia.

Untuk wilayah Jakarta Pusat, kata Irwandi, bangunan kelurahan ada yang sudah sampai 12 tahun belum pernah direhab. Misalkan, kantor Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Menurut dia, bangunan itu sudah tidak layak untuk menopang pelayanan di wilayah tersebut. "Kalau masih layak tidak mungkin diusulkan untuk dibangun," kata dia.

Namun, seluruh alokasi anggaran yang diusulkan masuk melalui bagian tata pemerintahan Jakarta Pusat. Menurut dia, rancangan anggaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing titik pembangunan. "Semua anggaran sesuai dengan kebutuhan kantor kelurahan yang akan dibangun apa saja," kata Irwandi.

Menurut dia, di wilayah Jakarta Pusat, baru di 2020 ada upaya pembangunan. Tahun sebelumnya, diakui dia, tidak ada sama sekali rencana rehab kantor lurah. Sehingga, kata dia, bila tahun depan dianggarkan pada

perencanaan anggaran belanja sangat dimaklumi. "Wajar saja, kalau tahun depan direhab, karena semata-mata untuk mendukung pelayanan," tambah Irwandi.

Seperti yang diketahui, alokasi anggaran rumah dinas juga tercantum untuk kebutuhan rehab rumah dinas gubernur kembali dimunculkan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang, dan Pertanahan DKI. Bahkan, objek kegiatannya rehabilitasi rumah dinas gubernur dengan nilai Rp2,4 miliar. (dny)